



ANALISIS EMPIRIS HUKUM WAGNER DAN HIPOTESIS KEYNES PADA PEREKONOMOIAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

Meiske Leno Maryar¹1, Kurniyati Indahsari²*2

^{1,2} Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

* Penulis Korespondensi: kurniyati.indahsari@trunojoyo.ac.id

Received: 23 10 2023 ; Published: 22 11 2024

A B S T R A C T

This study aims to examine Keynes's Hypothesis and Wagner's Law in the cities and districts in Papua Province economy. This study is a quantitative study using data on government spending, real Gross Regional Domestic Product (GRDP), and GRDP per capita of cities and districts in Papua Province in 2010-2020. Panel data regression and Granger Causality testing were used for testing the hypothesis of Keynes and Wagner's Law as well as for proving a two-way relationship between GDRP and government spending.

The results show that Wagner's Law does not work at the districts and cities in Papua Province. The regional economic growth doesn't effect the government spending or public sector share in the regional economy. Furthermore, the Granger Causality Test had proved a one way relationship between government spending on GRDP per capita which's mean the Keynes hypothesis are proved. The government spending increases in order to improve the regional economy in districts and cities in Papua Provinces.

Keywords: *GRDP; Government Spending; Wagner's Law; Keynes Hypothesis.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Hipotesis Keynes dan Hukum Wagner dalam ekonomi kota dan kabupaten di Provinsi Papua. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data tentang pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil, dan PDRB per kapita dari kota dan kabupaten di Provinsi Papua pada tahun 2010-2020. Regresi data panel dan uji Granger Causality digunakan untuk menguji hipotesis Keynes dan Hukum Wagner serta untuk membuktikan adanya hubungan dua arah antara PDRB dan pengeluaran pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Wagner tidak berlaku di kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Pertumbuhan ekonomi regional tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah atau bagian sektor publik dalam ekonomi regional. Selain itu, Uji Granger Causality membuktikan adanya hubungan satu arah antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB per kapita, yang berarti hipotesis Keynes terbukti. Pengeluaran pemerintah meningkat untuk memperbaiki ekonomi regional di kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Kata kunci: *PDRB; Pengeluaran Pemerintah; Hukum Wagner; Hipotesis Keynes*



How to cite:

Maryar, M. L. dan Indahsaro, K. (2024). Analisis Empiris Hukum Wagner Pada Tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua. *Journal of Economics Development Issues*, Vol 7(no.2), pp 15-29. <https://doi.org/10.33005/jedi.v7i2.335>.

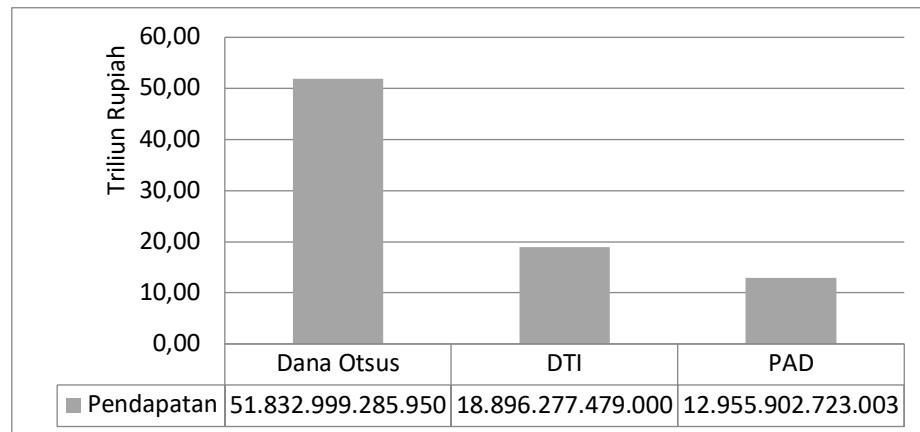
PENDAHULUAN

Provinsi Papua adalah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang menjalankan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi ini terletak di Pulau Papua, pulau terbesar serta terletak di wilayah bagian Timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea bagian Timur (Bappeda Provinsi Papua, 2013), kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah Provinsi Papua menjalankan pemerintahan serta mengolah sumberdaya yang dimiliki dalam menopang pembangunan daerah. Harapannya, tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan demokrasi sosial, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai (Lemhannas, 2019).

Pemerintah daerah mengolah sumberdaya yang dimiliki daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sebagaimana daerah lainnya, Pendapatan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Papua bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat, serta sumber lain penerimaan daerah yang sah. Namun, berbeda dengan di daerah lainnya, pemerintah Provinsi Papua mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 35 Tahun 2008 pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 dan UU Nomor 21 Tahun 2001 (World Bank, 2009). Otonomi khusus diberikan untuk wilayah khusus, pemerintahan khusus dengan wewenang khusus (Lemhannas, 2019). Untuk mengawasi program otsus tersebut dibentuklah Majelis Rakyat Papua (MRP) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2004 (Resosudarmo et al., 2018). Pemanfaatan dana Otsus Provinsi Papua ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus serta Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2014 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Otsus Papua bertujuan untuk menjalankan keadilan, penegakan supremasi hukum, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar di Provinsi Papua, yaitu (1) masalah Hak Asasi Manusia (HAM), di dalamnya pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; (2) kesenjangan (*gap*) wilayah antar Papua dengan provinsi lainnya; (3) kemiskinan (Torobi, n.d.); (BPK RI, 2021); (Resosudarmo et al., 2018). Untuk itu, pemerintah pusat melalui APBN terus menyalurkan dana otsus dan tambahan infrastruktur yang sangat besar untuk pembangunan di Provinsi Papua yang tunjukkan pada Gambar 1.

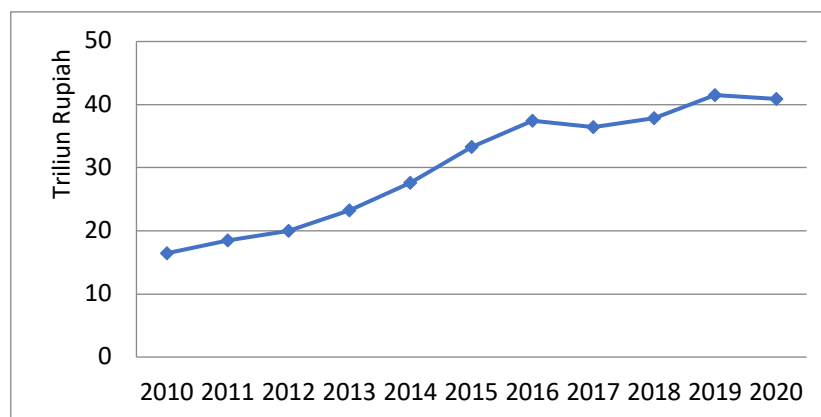
Seiring meningkatnya dan tingginya pendapatan (kapasitas fiskal) daerah, maka belanja atau pengeluaran pemerintah pun cenderung meningkat. Gambar 2 memperlihatkan kecenderungan peningkatan belanja pemerintah kabupaten/kota di Papua sekaligus membuktikan keseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsi kebijakan fiskal (Chaenari, 2018). Menurut Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016 pasal 8 ayat 1 dan 2, anggaran otonomi khusus sebesar 20 persen dikelola provinsi dan sebesar 80 persen disalurkan untuk kabupaten/kota, sehingga tidak mengherankan jika belanja pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kecenderungan meningkat.



Gambar 1: Total Dana Otsus, DTI, dan PAD Provinsi Papua Tahun 2010-2020 (dalam triliun rupiah)

Sumber: BPKAD Papua, DJPK Kemenkeu (data diolah)

Semakin bertambahnya kapasitas fiskal dan adanya komitmen pemerintah yang terus menerus berupaya untuk meningkatkan pembangunan berimbang tingginya pengeluaran dari APBN (World Bank, 2009). Peningkatan belanja pemerintah terus meningkat yang digunakan untuk membangun daerah. Alokasi belanja daerah dari Dana Otonomi Khusus sejalan dengan program prioritas yang ditentukan dalam Perdasus No 13 Tahun 2016 pasal 11 ayat 1 yaitu 30 persen untuk pendidikan, 25 persen untuk ekonomi kerakyatan, 15 persen kesehatan, 20 persen untuk pembangunan infrastruktur, afirmasi keagamaan 6 persen sedangkan diluar program prioritas dialokasikan maksimal 2 persen. Elastisitas pendapatan yang tinggi dapat disimpulkan bahwa belanja meningkat sebagai proporsi pendapatan (Hindriks & Myles, 2013). Membangun jalan dan jembatan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi serta politik dengan cepat (World Bank, 2018). Selain itu, anggaran belanja digunakan untuk menjalankan perekonomian daerah dengan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.



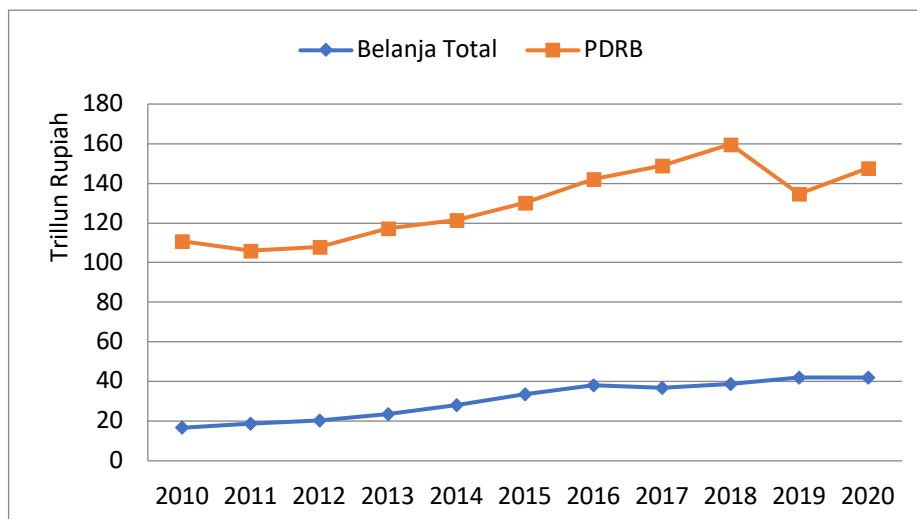
Gambar 2. Total Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2010-2020

Sumber: DJPK Kemenkeu, BPKAD Papua (data diolah)

Besaran pengeluaran atau belanja pemerintah ini harusnya terkait dengan kapasitas pembangunan di Papua, khususnya pada indikator pembangunan ekonomi. Harapannya, pengeluaran pemerintah akan seiring dengan kondisi perekonomian, salah satunya ditandai oleh perkembangan PDRB (ekonomi). Terdapat dua pandangan mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dan perkembangan ekonomi (Thabane & Lebina, 2016). Pandangan pertama pengeluaran pemerintah bersifat endogen dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi dikenal dengan Hukum Wagner (Thabane &

Lebina, 2016). Menurut hukum ini, untuk negara manapun pengeluaran pemerintah meningkat secara konstan seiring pertumbuhan pendapatan (Hindriks & Myles, 2013); (Magazzino et al., 2015a); (Narayan et al., 2012); (Sukartini & Saleh, 2012); (Jaén-García, 2018); (Solikin, 2018). Pandangan kedua adalah bahwa pengeluaran pemerintah bersifat eksogen dalam perkembangan ekonomi, yang lebih dikenal dengan Hipotesis Keynes (Olomola, 2004); (Thabane & Lebina, 2016); (Hindriks & Myles, 2013); (Solikin, 2018). Menurut pandangan kedua ini, pengeluaran pemerintah menyebabkan pertumbuhan pendapatan

Dalam perekonomian Provinsi Papua, perkembangan PDRB relatif seiring dengan perkembangan belanja (total) pemerintah (Gambar 3). Perkembangan PDRB Provinsi Papua terus mengalami peningkatan dari pengolahan hasil mengalokasikan sumberdaya alam yang dimiliki, khususnya kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia yang berada di Kabupaten Mimika”(MKD Uncen, 2019). Adapun sektor penyumbang terbesar pada PDRB Provinsi Papua yaitu sektor pertambangan, pertanian, dan konstruksi dan perdagangan. Sebesar 60 persen disumbang dari sektor pertambangan, diikuti sektor-sektor lainnya dalam sehingga berdampak peningkatan belanja daerah. Jika memang demikian, maka kondisi ini bisa mengindikasikan bahwa belanja daerah Provinsi Papua sejalan dengan pendapatan yang diterima untuk meningkatkan perekonomian daerah.



Gambar 3. PDRB Riil dan Belanja Total Provinsi Papua Tahun 2010-2020 (dalam triliun rupiah)

Sumber: BPS Papua, DJPK Kemenkeu, BPKAD Papua (data diolah)

Di sisi lain, belanja daerah Provinsi Papua meningkat sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi administrasi kesejahteraan masyarakat. Belanja operasi, belanja modal, transfer antar daerah serta belanja tak terduga meningkat berimbang pada pertumbuhan belanja pemerintah meningkat. PDRB yang tinggi mengindikasikan belanja modal juga tinggi. Disisi lain, PDRB menjadi indikator pengukur dalam pembangunan, tingginya PDRB mengindikasikan perkembangan perekonomian pada suatu daerah meningkat berimbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan pendapatan perkapita. Tingginya PDRB berarti belanja juga meningkat.

Pendapatan menyebabkan peningkatan kompleksitas pada pengeluaran pemerintah (Hindriks & Myles, 2013). Provinsi Papua masih tergolong daerah tertinggal sehingga diberlakukan percepatan pembangunan (Firman, 2020). Tahap awal dan kedua pembangunan dipandang sebagai periode industrialisasi sehingga diperlukan belanja infrastruktur dari pemerintah yang kemudian diikuti oleh peran swasta (Prasetya, 2012); (Hindriks & Myles, 2013); (Sasongko et al., 2019). Mengingat fakta bahwa, Provinsi Papua mengalokasikan dana otonomi khusus untuk mengatasi masalah mendasar yang terjadi yaitu kemiskinan, kesenjangan, dan

masalah HAM. Jika demikian, maka kondisi ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah sebagai indikator pembangunan yang dapat dilakukan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Tulisan ini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pengeluaran pemerintah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

KAJIAN LITERATUR

Adolph Wagner di tahun 1883 mengemukakan hukum yang dikenal dengan '*law of the increasing extension of state activity*', menganggap bahwa aktivitas pemerintah cenderung mengalami peningkatan (Bojanic, 2013); (Kesavarajah, 2012); (Sasongko et al., 2019); (Gatsi et al., 2019); (Solikin, 2018). Hukum ini berdasarkan pada pengamatan empiris yang dilakukan Wagner di Jerman dan kemudian negara-negara lain di Eropa, Amerika hingga ke Asia khususnya Jepang (Hindriks & Myles, 2013). Hasil pengamatan tersebut menjelaskan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung mengalami peningkatan. Semakin maju perekonomian maka pengeluaran pemerintah juga akan mengalami peningkatan.

Menurut Hukum Wagner, ada tiga alasan mengapa belanja pemerintah meningkat seiring dengan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) (Narayan et al., 2012); (Sukartini et al., 2012); (Jaén-García, 2018); (Solikin, 2018); (Hindriks & Myles, 2013); (García, 2017); (Sasongko et al., 2019). Kesatu, untuk menjalankan fungsi administrasi dan perlindungan sosial, pemerintah memerlukan biaya sehingga saat penduduk bertambah, maka menyebabkan terjadi peningkatan belanja pemerintah. Kedua, pemerintah membutuhkan biaya/pengeluaran untuk pembangunan budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, seperti untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan redistribusi pendapatan. Ketiga, kemajuan teknologi membutuhkan modal yang besar sehingga menyebabkan beberapa sektor cenderung melakukan monopoli dan mendorong ekspansi pemerintah serta tingginya belanja pemerintah. Hubungan yang timbul dalam interaksi antar masyarakat maupun dengan kemajuan teknologi tersebut harus diatur oleh pemerintah. Pun demikian, ketika terjadi peningkatan pendapatan perkapita, akan ada peningkatan permintaan layanan publik, sehingga pengeluaran pemerintah untuk layanan tersebut, seperti pendidikan, kesehatan dan rekreasi, juga akan meningkat" (sosial) (Hindriks & Myles, 2013).

Hipotesis Keynes didasarkan pada pemikiran John Maynard Keynes (1936) yang berbeda pandangan dengan Wagner. Keynes menuliskan dalam bukunya yang berjudul "*General Theory of Employment, Interest, and Money*" bahwa pemerintah harus campur tangan untuk merangsang permintaan agregat. Artinya bahwa pengeluaran pemerintah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi atau perkembangan pendapatan (Fajar, 2017); (Bojanic, 2013); (Babajide et al., 2020); (Sasongko et al., 2019); (Eldemerdash & Ahmed, 2019); (TAŞSEVEN, 2011); (Kesavarajah, 2012); (Gatsi et al., 2019) (Thabane & Lebina, 2016). Keynesian memandang hubungan antara perkembangan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sebagai kebalikan dari Hukum Wagner dengan alasan ekspansi fiskal melalui proses multiplier akan meningkatkan output (PDB), sehingga belanja pemerintah sebagai variabel eksogen yang dapat menyebabkan peningkatan pendapatan (PDB).

Dalam perekonomian modern, terjadi perubahan mendasar terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hipotesis Keynes dilatarbelakangi oleh gagasan bahwa tingginya pengangguran terus menerus disebabkan penurunan dari sektor swasta. Diperlukan peran pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan belanja yang berdampak pada perekonomian. Keynes beranggapan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan output agregat (Azwar, 2016); (Wahyudi, 2020); (Muhammed, 2014).

Hasil pengujian pada penelitian terdahulu sangat beragam mengenai Hukum Wagner dan Hipotesis Keynes. Penelitian yang dilakukan oleh Narayan et al. (2012), Sukartini dan Saleh (2012), dan Bayrakdar et al. (2015) menunjukkan bahwa Hukum Wagner berlaku dimana pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, pengujian yang dilakukan oleh Fajar (2017) menunjukkan berlakunya Hipotesis Keynes bahwa belanja pemerintah meningkatkan produk domestik regional bruto. Sementara itu, hasil uji Bojanic (2013), Udo & Effiong (2014), Babajide et al. (2020)

membuktikan bahwa terjadi hubungan dua arah yang berarti berlakunya Hukum Wagner maupun Hipotesis Keynes.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan riset kepustakaan (*library research*) dan memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) baik pusat maupun Provinsi Papua, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Papua serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJK) Kementerian Keuangan. Variabel, definisi serta data yang digunakan tersaji di Tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Data
Belanja pemerintah total (LGex)”	LGex menunjukkan belanja total pemerintah daerah periode 2010-2020 tingkat kabupaten/kota.
Produk Domestik Regional Bruto riil (LPDRBriil)	DatanPDRB yang digunakan adalah PDRB atas harga konstan, karena studi ini membahas model pertumbuhan dalam artinriil pada tingkat kabupaten/kota periode 2010-2020.
PDRB perkapita (LPDRBperkapita)	Data PDRB perkapita menunjukkan pendapatan rata-rata per satu orang penduduk pada kabupaten/kota periode 2010-2020.

Sumber: BPS Papua; BPKAD Papua; DJPK Kemenkeu

Dua teknik analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu teknik analisis regresi data panel untuk menguji Hukum Wagner dan Kausalitas Granger untuk menguji hubungan dua arah antara pengeluaran pemerintah dengan pendapatan atau PDRB (Hukum Wagner dan Hipotesis Keynes). Untuk menguji Hukum Wagner, digunakan model spesifikasi Peacock-Wiseman sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Spesifikasi Model Pengujian Hukum Wagner

Formulasi”	”Spesifikasi Model”	”Prediksi Model Hukum Wagner Berlaku”
Peacock-Wiseman”(1968, 1979)”	$LG_t = a_0 + a_1LY_t + e_t$ <p>”Dimana:”</p> <ul style="list-style-type: none"> • LG_t : logaritma”dari pengeluaran pemerintah”riil • LY_t : logaritma dari output (PDRB) riil. 	Jika $a_1 > 1$ (elastisitas), maka tingkat pengeluaran pemerintah sangat responsif saat terdapat perubahan pendapatan”(GDP/PDB/PDRB).

Sumber: (Balatsky, 2012); (Sukartini & Saleh, 2012); (Thabane & Lebina, 2016)

Sebagaimana ketentuan analisis regresi data panel, maka Uji Chow dan Hausman dilakukan untuk memilih model regresi terbaik di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Pengujian asumsi klasik regresi liner pun dilakukan untuk memastikan tidak adanya multikolinier, heteroskedastik, maupun autokorelasi data (Gujarati, 2012). Uji F dan T digunakan untuk membuktikan hipotesis Hukum Wagner.

Kausalitas Granger digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah total dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga dapat diketahui apakah kondisi

perekonomian dan pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota di Papua mendukung Hukum Wagner atau Hipotesis Keynes. Persamaan yang digunakan untuk melakukan uji Kausalitas Granger ditunjukkan pada persamaan berikut.

$$X_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i X_t + \sum_{j=1}^n b_j Y_{t-1} + u_t \quad (3.1)$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^r c_i X_{t-1} + \sum_{j=1}^s d_j Y_{t-1} + v_t \quad (3.2)$$

Keterangan:

X_t : Produk Domestik Regiona Bruto (PDRB)

Y_t : Belanja pemerintah total

u, v : error term

Dimana u dan v adalah error term yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan $m=n, r=s$. Selanjutnya hasil regresi dari kedua bentuk model regresi linier tersebut memiliki empat kemungkinan berupa hipotesis sebagai berikut (Pranomo, 2001).

1. Jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j = 0$, maka terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel Y ke X.
2. Jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel X ke Y.
3. Jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j = 0$, maka variabel X dan Y bebas antara satu dengan yang lain atau diantara kedua variabel tersebut tidak ada hubungan kausalitas.
4. Jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas dua arah antara variabel Y dan variabel X.

Sesuai persyaratan pengujian Kausalitas Granger, maka dilakukan tiga hal. Pertama, uji akar unit dengan metode Levin-Lin-Chu untuk mematikan data stasioner. Kedua, uji Kointegrasi dengan uji Pedroni dengan lag maksimum 4 untuk memastikan tidak adanya kointegrasi. Ketiga, penentuan *Lag Length Criteria* (lag optimum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian model terbaik dengan uji Chow dan uji Hausman memperlihatkan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengujian asumsi klasik pun memperlihatkan bahwa data telah memenuhi persyarat pada uji Asumsi Klasik dan dapat dilanjutkan dengan uji pengujian hipotesis.

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel

Uji T			Std. Error	t	Uji F Prob>F	Adj. Squared	R ²
LGex	Coef	P> t					
LPDRBriil	0,5715	0,000	0,07093	8,06	0,000	0,3927	0,4500
LPDRBperkapita	0,0589	0,003	0,02000	2,95			
Kons	4,390134						

Sumber: hasil uji Stata (data diolah)

Persamaan model regresi model panel

$$LG_{it} = 4,3901 + \beta^1 0,5715LY_{it} + \beta^2 0,05897_{it} + e_{it} \quad (4.1)$$

Selanjutnya estimasi model Peacock-Wiseman

$$LG_t = \alpha_0 + \alpha_1 LY + e \quad \alpha_1 > 1 \quad (4.2)$$

$$LG_t = 4,390134 + 0,5715LY + e_t \quad (4.3)$$

$$T\text{-stat } (8,06) \quad (2,05553)$$

$$R^2 = 0,45$$

Tabel 3 memperlihatkan bahwa PDRB, baik riil maupun per kapita mempengaruhi belanja pemerintah. Walaupun demikian, berdasarkan model Peacock-Wiseman yang menyatakan bahwa Hukum Wagner berlaku jika koefisien PDRB (α) harus lebih besar daripada 1 (elastis) pada persamaan 4.2 dan 4.3, maka penelitian menunjukkan tidak berlakunya Hukum Wagner pada perekonomian kabupaten dan kota di

Provinsi Papua. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Hukum Wagner tidak secara mutlak berlaku secara universal pada suatu negara atau wilayah (Fajar, 2017). Selain itu, perhitungan mengkonfirmasi bahwa ekonomi internasional yang berada dalam keadaan transisi jelas menyimpang dari Hukum Wagner tetapi belum meninggalkannya (Balatsky, 2012).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Hukum Wagner tidak berlaku pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua, diantaranya: (1) pemberlakuan program otonomi khusus Provinsi Papua melalui UU Otonomi Khusus Papua No. 35 Tahun 2008. Sehingga alokasi anggaran belanja daerah ditunjang dari APBN melalui dana otonomi khusus dan dana tambahan Infrastruktur (World Bank, 2009); (2) Perbedaan struktur APBD dengan APBN menyebabkan proporsi belanja daerah bersandar pada kegiatan yang tidak produktif. Oleh sebab itu, belanja pemerintah tidak bereaksi secara optimal terhadap peningkatan pendapatan (Sasongko et al., 2019); (3) Terjadinya aglomerasi ekonomi di Provinsi Papua, dimana empat kabupaten yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura yang berkontribusi lebih pada pembentukan PDRB Provinsi Papua. Dalam hal ini, belanja meningkat dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui alokasi dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sejalan dengan Peraturan Daerah Khusus Papua No 13 Tahun 2016 pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikian, belanja menjadi faktor eksogen yang dapat menyebabkan peningkatan pendapatan (TAŞSEVEN, 2011); (Gatsi et al., 2019).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2017), dengan perbandingan jumlah tahun analisis serta perubahan kebijakan undang-undang dan peraturan daerah, dimana hasil pengujian dengan menggunakan model Peacock-Wiseman menyatakan hipotesis Hukum Wagner tidak berlaku pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Penelitian Sukartini & Saleh (2012) yang menggunakan data panel tahun 1990-2010 juga memperlihatkan bahwa dari enam model spesifikasi Hukum Wagner, hanya satu model yaitu Goffman-Mahar yang terbukti mendukung Hukum Wagner.

Dalam pembuktian Kausalitas Granger Hukum Wagner dan Hipotesis Keynes, hasil uji akar unit dengan metode Levin-Lin-Chu memperlihatkan bahwa masing-masing variabel penelitian dinyatakan telah stasioner. Hasil uji kointegrasi juga memperlihatkan bahwa data terbebas dari masalah kointegrasi. Sementara itu, hasil penentuan lag dipilih dengan menggunakan informasi kriteria dengan melihat nilai dari *Akaike Info Criterion* (AIC). Panjang lag yang digunakan ialah pada lag 6 karena memiliki nilai AIC yang lebih kecil. Selanjutnya, pengujian dengan menggunakan Kausalitas Granger dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis	Ob s	F- Statistic	Prob
<i>LPDRB riil does not Granger Cause LGex</i>	140	1.74082	0.1167
<i>LGex does not Granger Cause LPDRB riil</i>		2.14331	0.0528
<i>LPDRB_perkapita does not Granger Cause LGex</i>	145	0.14141	0.9904
<i>LGex does not Granger Cause LPDRB_perkapita</i>		3.18857	0.0059
<i>LPDRB_perkapita does not Granger Cause LPDRB riil</i>	140	0.27802	0.9464
<i>LPDRB riil does not Granger Cause LPDRB_perkapita</i>		0.23162	0.9656

Sumber: hasil uji Eviews (data diolah)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa terjadi hubungan satu arah antara belanja terhadap PDRB perkapita dengan nilai prob 0,0059. Sehingga belanja menyebabkan peningkatan PDRB perkapita (Fajar, 2017); (Sasongko et al., 2019); (Babajide et al., 2020). Hal ini mendukung Hipotesis Keynes bahwa belanja pemerintah menyebabkan peningkatan PDRB perkapita pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Selanjutnya dilanjutkan dengan regresi data untuk mengintrepertasikan nilai koefisien dari masing-masing variabel.

Tabel 5. Belanja Mempengaruhi PDRB Perkapita

Variabel	Coef	Std.Error	F-Statistic	Prob
C	64.8929	5.51033	11.7764	0,0000
Belanja (-1)	0.19387	0,01214	1.96583	0,0504
Belanja (-2)	0.20606	0.01267	2.05635	0,0408
R- Squared	0.21758			
Adj R. squared	0.20863			
Prob	0,00000			

Sumber: hasil uji Eviews (data diolah)

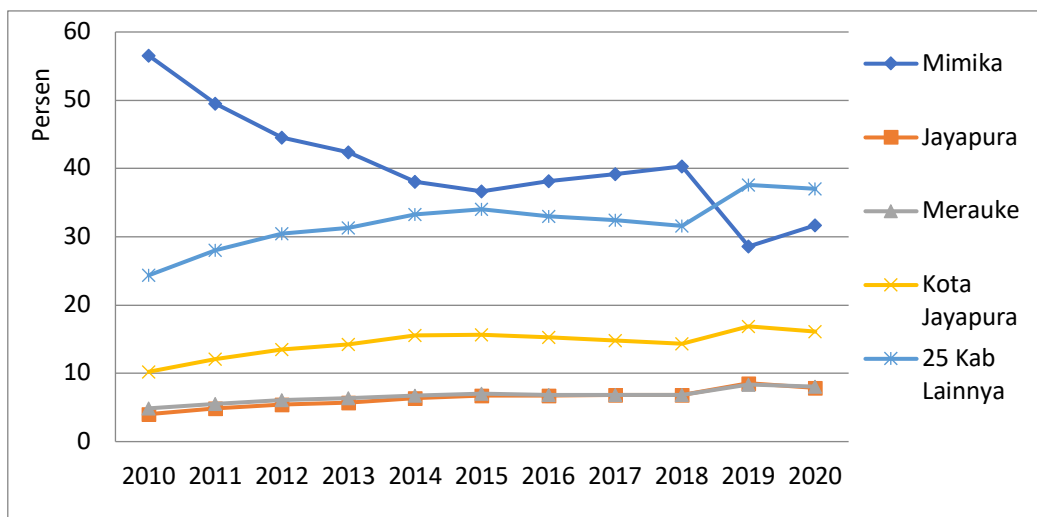
- 1) PDRB Perkapita dipengaruhi oleh lag 1 dan lag 2 Belanja, ditunjukkan dengan nilai F-statistik > t-tabel. Nilai koefisien 0,19387 menunjukkan bahwa jika tahun lalu Belanja meningkat 10 persen maka LPDRB Perkapita meningkat 19 persen dengan variabel lain dianggap tetap. Selanjutnya koefisien 0,20 menunjukkan bahwa jika dua tahun lalu belanja meningkat 10 persen maka PDRB Perkapita meningkat 20 persen dengan variabel lain dianggap tetap.
- 2) R-Squared sebesar 0.2175 menunjukkan bahwa 21 persen variabel belanja tahun lalu dan belanja dua tahun lalu dapat menjelaskan PDRB Perkapita, sedangkan sisanya 78,25 (100 – 21,75) persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang sudah terbentuk.

Variabel belanja pemerintah menyebabkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari unit usaha dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua disebabkan oleh tingginya belanja pemerintah yang dialokasikan untuk membangun daerah. Hipotesis Keynes menyatakan bahwa, “*government expenditure is a component of fiscal policy and can be used as policy instrument to influence growth*” (Eldemerdash & Ahmed, 2019). Keynes menjelaskan campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui alokasi belanja pemerintah yang semakin dalam meningkatkan perkembangan ekonomi daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam wujud peningkatan pendapatan perkapita. Perkembangan PDRB Riil maupun PDRB Perkapita tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua meningkat dipengaruhi oleh tingkat belanja pemerintah yang menurut Keynes pengeluaran pemerintah sebagai pembentuk pendapatan atau output (Azwar, 2016); (Sasongko et al., 2019).

Hipotesis Keynes dilatarbelakangi bahwa tingginya pengangguran yang terus menerus akibat penurunan sektor swasta membutuhkan peran pemerintah, melalui belanja pemerintah yang berdampak pada perekonomian (Muhammed, 2014); (Wahyudi, 2020). Selain itu, kondisi daerah dalam mengalami gejolak ekonomi membutuhkan kebijakan dan peran pemerintah didalamnya (Sukirno, 2006). Perkembangan belanja pemerintah berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam perkembangannya, perekonomian Provinsi Papua terkonsentrasi. Kabupaten Mimika, Jayapura, Merauke dan Kota Jayapura yang memiliki peran besar terhadap total Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua, kontribusi keempatnya sebesar 65 persen dari total PDRB ditunjukkan pada gambar 4. Adanya konsentrasi tersebut, mengindikasikan terjadi aglomerasi ekonomi di Provinsi Papua. Aglomerasi merupakan kondisi perekonomian terkonsentrasi secara spasial di kawasan perkotaan untuk penghematan dari wilayah yang berdekatan (Mauleny, 2015).

Kabupaten Mimika dengan sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten maupun provinsi (MKD Uncen, 2019), Kota Jayapura pada industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan (Ponto et al., 2016), sektor pertanian, konstruksi berkontribusi besar pada PDRB Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayapura (Andani et al., 2015); (BPS Kab Jayapura, 2020). Kondisi ini menunjukkan terjadinya kesenjangan pada perekonomian Provinsi Papua. Kesenjangan ekonomi antar wilayah seringkali menjadi masalah yang serius karena menunjukkan beberapa wilayah yang berkembang dan mencapai pertumbuhan cepat sementara yang lain mengalami pertumbuhan yang lambat (Iskandar & Saragih, 2018). Dalam hal ini, terjadi kesenjangan teritorial, yaitu perbedaan pertumbuhan dan pembangunan yang ada setiap wilayah (Sastra, 2017). Hal ini menjadikan pemerintah selaku aktor dalam menjalankan perekonomian baik melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.



Gambar 4. Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap Perkembangan PDRB Provinsi Papua Tahun 2010-2020 (dalam persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua (data diolah)

Melalui dana otonomi khusus Papua, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja untuk menjalankan perekonomian serta menjadi akselerator pembangunan daerah sesuai kebijakan otonomi khusus. Alokasi dana otsus diatur dalam Peraturan Daerah Khusus (perdasus) Papua No. 13 Tahun 2016, pasal 8 ayat 1 dan 2 menetapkan pembagian alokasi dana otonomi khusus sebesar 20 persen dikelola di tingkat provinsi sedangkan sebesar 80 persen disalurkan pada tingkat kabupaten/kota diluar dari Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Adapun alokasi dana otsus di tingkat kabupaten/kota dialokasikan sesuai Perdasus No 13 Tahun 2016 pasal 11 ayat 1 untuk program prioritas. Sebesar 30 persen untuk pembiayaan pendidikan, 15 persen untuk kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan 25 persen, 20 persen untuk pembangunan infrastruktur, afirmasi keagamaan 6 persen sedangkan diluar program prioritas dialokasikan maksimal 2 persen. Hal ini menunjukkan peran pemerintah dalam menjalankan perekonomian dan percepatan pembangunan dengan mengalokasikan anggaran belanja dari dana otsus dan pendapatan daerah yang diterima.

Belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak perekonomian untuk meningkatkan PDRB serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Realisasi belanja pemerintah dalam infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB (Rahman & Chamelia, 2015). Disisi lain, peningkatan belanja pemerintah dapat berpengaruh signifikan dalam meningkatkan PDRB perkapita (Arfiyansyah, 2018). Belanja modal oleh pemerintah memiliki kontribusi penting dalam peningkatan PDRB daerah, hal ini disebabkan oleh perubahan perekonomian yang mengalami peningkatan (Lestari & Budhi, 2014). PDRB daerah meningkat jika PDRB perkapita mengalami peningkatan. Selain itu, belanja dan investasi pemerintah juga berpengaruh penting dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Mauliansyah & Mard, 2017), sehingga dapat mengatasi aglomerasi ekonomi.

Perkembangan belanja pemerintah baik bagi perekonomian, karena belanja pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi (Selvanathan et al., 2021). Dengan demikian, kabupaten-kabupaten yang memiliki kontribusi kecil bagi PDRB dapat mengalokasikan dana otonomi khusus dalam menunjang perekonomian daerah, sehingga belanja dapat menjadi penggerak perekonomian yang berdampak pada pembangunan. Dalam hal ini, pembuat kebijakan perlu berhati-hati karena pemotongan biaya belanja akan mengurangi pertumbuhan di masa mendatang (Solikin, 2018). Karena besaran pengganda fiskal atas kenaikan belanja cenderung memiliki bobot yang kecil terhadap nilai output yang dihasilkan (Setiawan, 2017). Sehingga dapat bermasalah karena menyebabkan *crowding out* sektor swasta (Yovo, 2017). Rendahnya investasi sektor swasta akan menyebabkan aktivitas perekonomian yang melambat disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat (Setiawan, 2010). Oleh sebab itu, perlu alokasi belanja pemerintah disalurkan bagi hal-hal yang berpotensi meningkatkan efisiensi perekonomian di masa mendatang misalnya,

infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan serta kesinambungan fiskal bagi pemerintah di masa mendatang (Abiodun Dada, 2017); (Yovo, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fajar (2017); Sasongko (2019); Gatsi (2019), dimana pada hasil kajian yang dilakukan menyatakan bahwa belanja pemerintah menjadi faktor eksogen yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, dalam hal ini belanja menyebabkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil maupun PDRB perkapita. Oleh sebab itu, pada hasil uji kausalitas membuktikan terjadi hubungan satu arah belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga Hipotesis Keynes berlaku pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua tahun 2010 sampai 2020.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi, pengujian serta pendeskripsikan yang telah dilakukan, maka dapat dibuatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Wagner tidak berlaku pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua meskipun memiliki nilai signifikansi yang positif. Hal ini terjadi karena pemenuhan pada prediksi $a_1 > 1$ tidak terpenuhi, sehingga elastisitas PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah. Oleh sebab itu, hasil empiris membuktikan bahwa Hukum Wagner yang menyatakan bahwa pangsa sektor publik dalam perekonomian akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada pada perekonomian Provinsi Papua tahun analisis 2010-2020.
2. Hipotesis Keynes mengungkapkan bahwa belanja berperan dalam peningkatan PDRB perkapita. Dengan mengalokasikan belanja daerah pada anggaran pendapatan yang diperoleh dari dana otonomi khusus dapat menggerakkan PDRB serta dapat mengatasi kesenjangan ekonomi (pendapatan) akibat terjadinya aglomerasi ekonomi di Provinsi Papua. Dengan meningkatnya belanja pemerintah pada infrastruktur maupun investasi berpengaruh dalam membantu mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Papua.

Sejalan dengan hasil penelitian yang didapat, maka diajukan beberapa saran yang dipertimbangan dalam mengalokasikan belanja daerah sebagai berikut:

1. Pembuat kebijakan harus berhati-hati serta merampingkan anggaran belanja berdampak pada penurunan PDRB karena jumlah uang beredar tidak mendorong PDRB daerah. Disisi lain, pemerintah perlu mengurangi belanja yang kurang berdampak pada pembangunan ekonomi daerah misalnya subsidi, bunga pinjaman serta administrasi.
2. Belanja pemerintah dapat menjadi variabel yang menjalankan perekonomian, dalam hal ini meningkatkan pertumbuhan PDRB. Sehingga dapat menyelesaikan masalah kesenjangan wilayah yang berdampak pada agromerasi ekonomi. Sehingga belanja dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam hal alokasi dana otonomi khusus bagi kabupaten/kota yang berkontribusi kecil pada PDRB provinsi Papua.
3. Pembuat kebijakan perlu berhati-hati karena pemotongan belanja akan mengurangi pertumbuhan di masa depan, karena besaran pengganda fiskal pada kenaikan belanja cenderung memiliki bobot yang kecil terhadap nilai output yang dihasilkan aktivitas pemerintah dalam perekonomian, sehingga menyebabkan *crowding out* sektor swasta. Rendahnya investasi swasta menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Sehingga belanja perlu disalurkan pada hal-hal yang berpotensi meningkatkan perekonomian di masa mendatang misalnya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan.
4. Dalam mengkaji hukum Wagner secara matematik tidak serta merta membuktikan bahwa bahwa terjadi hubungan searah. Sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menguji keenam spesifikasi model pada Hukum Wagner dengan menggunakan jumlah observasi yang banyak, jumlah tahun yang panjang sehingga dapat menjawab fenomena yang diteliti tentunya dengan model analisis yang berbeda pula

DAFTAR PUSTAKA

- Abiodun Dada, M. (2017). Modelling the Behaviour of Government Spending and Economic Growth in Six ECOWAS Countries (1981-2013). *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 5(1), 34. <https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20170501.14>
- Arfiyansyah, S. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.77>
- Andani, R., Hafiziandi, Y., & Kretu, B. (2015). ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2007-2013. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, II(3), 67–70.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia* Allocative Role of Government through Procurement of Goods/Services and Its Impact on Indonesian Economy. In *Kajian Ekonomi Keuangan* (Vol. 20, Nomor 2). <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Babajide, A. A., Okunlola, F. A., Nwuba, E., & Lawal, A. I. (2020). Wagner's Propotion in Nigeria: An Econometric Analysis. *Heliyon*, 5-8.
- Badan Pusat Statistik Papua. (n.d.). *Produk Domestik Regional Bruto*. Retrieved Agustus 7, 2020, from <https://papua.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Produk Domestik Regional Bruto*. Retrieved Januari 3, 2021, from <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha.html#subjekViewTab3>
- Balatsky, E. (2012). Wagner's Law, the Armey-Rahn Curve, and the Paradox of Wealth. *Problems of Economic Transition*, 54(12), 40–54. <https://doi.org/10.2753/pet1061-1991541203>
- Bappeda, P. P. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023*.
- Bappeda Provinsi Papua. (2013). *Pemerintah Provinsi Papua. In Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025* (hal. 1–167).
- Bird, R. (1971). Wagner's Law od Expanding State Activity Public Finance. https://www.researchgate.net/publication/226647729_Wagner's_Law_of_Expanding_State_Activity, 1.
- Bojanic, A. N. (2013). Testing the validity of wagner's law in Bolivia: A cointegration and causality analysis with disaggregated data. *Revista de Analisis Economico*, 28(1), 25–46. <https://doi.org/10.4067/s0718-88702013000100002>
- BPK RI. (2021). *Pendapat BPK dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat 2021*.
- BPS Kab Jayapura. (2020, Maret 1). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jayapura Lapangan Usaha 2016-2020*. Retrieved Desember 2, 2021, from Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura: <https://jayapurakab.bps.go.id/>
- BPS Papua. (2016). *Produk Domestik Regional Provinsi Papua menurut Lapangan Usaha*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- BPS Papua. (2019). *Papua dalam Angka 2019*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Papua.
- Chaenari, E. Y. (2018, Maret 29). *Kebijakan Fiskal Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Retrieved Maret 13, 2021, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). *Kementerian Keuangan*. Retrieved Agustus 8, 2020, from Data Histori APBD: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=8851
- Fajar, M. (2017). Pengujian Validitas Hukum Wagner (studi kabupaten-kabupaten di provinsi Papua).
- Firman. (2020, Mei 11). *Ini Daerah Tertinggal Menurut Perpres*. Retrieved Mei 1, 2021, from Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia: <https://kemendesa.go.id>
- García, M.-J. (2017). *An empirical study of Wagner ' s law applied to the Spanish case An Empirical Study of Wagner ' s Law Applied to the Spanish Case*. November.

- Garcia, M. J. (2018). Wagner's Law: A Revision and a New Empirical Estimation. *Revista Hacienda Publica Espanola*, 23.
- Gatsi, J. G., Appiah, M. O., & Gyan, J. A. (2019). A test of Wagner's hypothesis for the Ghanaian economy. *Cogent Business and Management*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1647773>
- Granger, C. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 424-438.
- Grullón, S. (2014). NATIONAL INCOME AND GOVERNMENT SPENDING: CO-INTEGRATION AND CAUSALITY RESULTS FOR SELECTED LATIN AMERICAN COUNTRIES. *International Journal of Commerce and Management*, II(4), 1–7. <https://doi.org/10.1108/ijcoma.2007.34817aaa.001>
- Gujarati, D. (2012). *Econometrics by Example*. New York: PALGRAVE MACMILLEN.
- Gujarati, D. N. (2003). *BASIC ECONOMETRICS* (fourth Edi). McGraw-Hill/Irwin.
- Hindriks, J., & Myles, D. M. (2013). *Intermediate Public Economics, second edition*. London: MIT Press.
- IMF Keynes: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm#author> FINANCE & DEVELOPMENT, September 2014, Vol. 51, No. 3
- Iskandar, A., & Saragih, R. (2018). Analisis Kondisi Kesenjangan Ekonomi Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. *Info Artha*, 2(1), 37–52. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.232>
- Jaén-García, M. (2018). Wagner's law: A revision and a new empirical estimation. *Hacienda Publica Espanola*, 224(1), 13–35. <https://doi.org/10.7866/HPE-RPE.18.1.1>
- Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan>.
- Kesavarajah, M. (2012). Wagner's Law in Sri Lanka: An Econometric Analysis. *International Scholarly Reserach Network*, 3-7.
- Lemhannas. (2019, Juli 29). *FGD Lemhannas Penguatan Otonomi Daerah untuk Mendukung Pertahanan Negara*. Jakarta: Lemhannas.go.id.
- Lestari, N. P. S. E., & Budhi, M. K. S. (2014). Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Angkatan Kerja Terhadap PDRB Per Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(12), 586–593.
- Levin, A., Lin, & Chu, F. (1992). *Unit Roots test in Panel Data: Asyotic and Finite Sample Properties*. San Diego: University of California.
- Magazzino, C., Giolli, L., & Mele, M. (2015a). International Journal of Economics and Financial Issues Wagner's Law and Peacock and Wiseman's Displacement Effect in European Union Countries: A Panel Data Study. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 812–819. <http://www.econjournals.com>
- Mauleny, A. T. (2015). Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, Dan Kebijakan Pembangunan Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 147–162. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/351>
- Mauliansyah, R., & Mard, Z. (2017). Pengaruh Investasi dan Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, 1(2), 187–195.
- MKD Uncen. (2019, Agustus 13). Retrieved April 28, 2021, from mkd.uncen: <https://www.mkduncen.ac.id/kontribusi-freeport-ke-ekonomi-papua-dan-indonesia-harus-lebih-besar>
- Muhammed, A (2014). Government Spending for Economic Growth in Ethiopia. *Journal of Economic and Sustainable Development*
- Narayan, S., Rath, B. N., & Narayan, P. K. (2012). Evidence of Wagner's law from Indian states. *Economic Modelling*, 29(5), 1548–1557. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.05.004>
- Olomola, P. A. (2004). Cointegration Analysis-Causality Testing and Wagner's Law: The case of Nigeria, 1970-2001. *Journal of Social and Economic Development*, 76-90.
- Ponto, M., Kalangi, J. B., & Luntungan, A. Y. (2016). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Jayapura. *Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 5, 1–20.

- Pranomo, D. (2001). PENGGUNAAN METODE GRANGER UNTUK UJI KAUSALITAS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 91–100.
- Prasetya, F. (2012). Modul Ekonomi Publik, Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah. In *Modul EKonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah* (Vol. 53, Nomor 9, hal. 1689–1699).
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Jejak*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>
- Resosudarmo et al. (2009). Papua I: Challenges of Economic Development in An Era of Political and Economic Chance. *Working with Nature Against Poverty*, 22-30.
- Resosudarmo, B., Napitupulu, L., & Manning, C. (2018). 2 Papua I: Challenges of Economic Development in an Era of Political and Economic Change. In *Working with Nature against Poverty* (Nomor December). <https://doi.org/10.1355/9789812309600-008>
- Ridhoi, M. A. (2020, Agustus 18). *Menilik Dampak Dana Otsus Papua & Papua Barat, Masih Perlukah?* Retrieved April 18, 2021, from katadata.co.id: <https://katadata.co.id>
- Sasongko, G., Huruta, A. D., & Wardani, A. (2019). Does the Wagner's Law exist in a strategic national area? An evidence from Kedungsepur - Indonesia. *Insights into Regional Development*, 1(2), 99–117. [https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.2\(2\)](https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.2(2))
- Sastra, E. (2017). *Kesenjangan Ekonomi : Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Expose.
- Selvanathan, E. A., Selvanathan, S., & Jayasinghe, M. S. (2021). Revisiting Wagner's and Keynesian's propositions and the relationship between sectoral government expenditure and economic growth. *Economic Analysis and Policy*, 71, 355–370. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.05.005>
- Setiawan, Josafat Dirham. (2010). Fenomena Crowding Out, Karakteristik, dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Retrieved 3 Desember 2021m, from <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10458>
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah & Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha*, 66-68.
- Sukartini, N. M., & Saleh, S. (2012). Wagner's Law test in the Indonesia Economic Expenditure Review Central Government and the Provincial. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 7-10.
- Sukirno. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dsar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- TASSEVEN, Ö. (2011). The Wagner's Law: Time Series Evidence for Turkey, 1960-2006. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 2(12), 304–316. <https://doi.org/10.31671/dogus.2018.145>
- Thabane, K., & Lebina, S. (2016). Economic Growth and Government Spending Nexus: Empirical Evidence from Lesotho. *African Journal of Economic Review*, IV(1), 143–156.
- Torobi, K. L. W. (n.d.). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Distrik jayapura Utara Kota Jayapura. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 63–74.
- Udo, A., & Charles, E. (2014). Economic Growth and Wagner's Hypothesis: The Nigerian Experience. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 42-48.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 103–113.
- World Bank. (2018). *The Human Capital Project*. Washington D.C: The World Bank.
- World Bank. (2009). *Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik dalam Suatu Provinsi Otonomi Khusus*.
- World Bank. (2011). Papua Public Expenditure Analysis. In *Papua Public Expenditure Analysis*. <https://doi.org/10.1596/27234>
- Yovo, K. (2017). Public Expenditures, Private Investment and Economic Growth in Togo. *Theoretical Economics Letters*, 07(02), 193–209. <https://doi.org/10.4236/tel.2017.72017>